

## HUBUNGAN SEBAB AKIBAT UNGKAPAN PAHLAWAN TANPA TANDA JASA TERHADAP IDENTITAS DAN KESEJAHTERAAN GURU DI INDONESIA

Indra Gunawan  
Universitas Pendidikan Indonesia  
indra16gun@student.upi.edu

### *Abstract*

*The identity and image of the teacher in the eyes of the Indonesian people to adulthood is now still synonymous with the expression "Hero without a sign of service". This paper aims to analyze the causal relationships that appear in unsung heroic expressions. Understanding the causal relationship of unsung heroes' expressions is expected to guide people or people involved in education to position teachers in Indonesia on the more human side. The method used in this study uses framing analysis or content analysis on the phenomenon of unsung heroic expressions from a social study in Indonesian society, the object of study in this paper is the approach of researcher interpretation during the context of the causal relationship due to the unsung heroic expression that is the focus the analysis. The results of this research show that the expression of unsung heroes is considered to have become an identity for teachers in Indonesia. This paper is also expected to stimulate the teaching profession research and development in Indonesia.*

**Keywords:** *Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, Teacher, Wealthness*

### **Abstrak**

Identitas dan citra guru di mata masyarakat Indonesia hingga dewasa kini masih identik dengan ungkapan “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang muncul dalam ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa. Dengan memahami hubungan sebab akibat dari ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa diharapkan dapat memandu masyarakat ataupun orang-orang yang terlibat dalam pendidikan untuk memposisikan guru di Indonesia pada sisi yang lebih manusiawi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis framing atau analisis isi mengenai fenomena ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa dari sebuah kajian sosial di dalam masyarakat Indonesia, objek kajian dalam tulisan ini merupakan pendekatan interpretasi peneliti selama konteks hubungan sebab akibat ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa yang menjadi fokus analisisnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa dianggap telah menjadi identitas bagi guru di Indonesia. Tulisan ini juga diharapkan dapat merangsang penelitian dan pengembangan profesi guru di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pahlawan Tanpa Tanda Jasa; Guru; Kesejahteraan

### **A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan, kajian tentang pendidikan yang

bertemakan ideologis atau filosofis jarang ditemukan di jurnal-jurnal pendidikan di Indonesia. Beberapa kemungkinan penyebabnya antara lain: (1) Masalahnya

tidak populis dan kurang menarik; (2) Para pakar pendidikan cenderung mengembangkan hal-hal yang sifatnya praksis implementatif; (3) Semakin langkanya jurusan atau program studi bercorak filsafat pendidikan atau ideologi pendidikan, atau teori pendidikan (Soeharto, 2010). Dengan maksud untuk mengisi kekosongan kajian tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan guru di Indonesia yang berkaitan dengan identitas dan kesejahteraan guru yang selalu diharapkan tanpa tanda jasa.

Sebagaimana yang kita ketahui, pada saat peralihan zaman kolonial menuju zaman merdeka, sejarah mencatat bahwa peran guru dapat dikatakan sangat berbakti dalam menggambarkan masa depan bangsa dengan tanpa pamrih, hingga pada saat itu guru dijuluki sebagai pahlawan tanpa tanda jasa (Tilaar, 2003). Kekuatan kultural masyarakat dalam kasus ini begitu berpengaruh dalam menentukan identitas dan citra guru. Meskipun tidak memiliki kekuatan memaksa sebagaimana kekuatan Negara, masyarakat memiliki kekuatan kultural dan sosial yang mempengaruhi dan menentukan identitas dan citra guru. Identitas dan citra guru di mata masyarakat Indonesia sejak dulu hingga dewasa kini masih identik dengan ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa (Koesoema, 2009). Dalam kajian yang dilakukan oleh Bumbungan (2016) bahwa peran guru di Indonesia sangat strategis, guru berperan sebagai agen perubahan, perubahan itu tidak hanya intelektual saja, tetapi berbagai perubahan yang lain juga perlu. Misalnya perubahan moral, spiritual, sosial, dan kebiasaan.

Ungkapan yang semula hanya sebuah kiasan dari masyarakat, namun lama-lama berubah menjadi sebuah kekuatan kultural dan sosial dalam membentuk identitas guru di kemudian hari. Alhasil, karena ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa, tidak jarang guru di Indonesia yang tidak mendapatkan

kesejahteraan yang layak malah dianggap sebagai guru sejati tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan dari guru tersebut. Dampaknya secara tidak sadar dalam kurun waktu yang lama masyarakat Indonesia telah menanamkan stereotip bahwa guru adalah sosok yang wajar apabila hidupnya menderita.

Nasib berliku bahkan tragis para guru di Indonesia bukan mitos, tetapi realita. Bukan rahasia umum apabila penghasilan menjadi guru (khususnya honorer) saat ini terbilang rendah, bahkan di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Ada banyak guru dengan pendidikan tinggi setingkat sarjana yang mendapatkan penghasilan di bawah Rp. 1.000.000/bulan. Bahkan sampai kini, di tahun 2018, masih ada guru di Indonesia yang hanya mendapatkan penghasilan Rp. 200.000/bulan.

Berdasarkan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa pada profesi guru adalah awal mula mengapa guru dimiskinkan secara struktural di negeri ini. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan (Wahyu, 2009). Apabila konteksnya diarahkan kepada profesi guru, dikatakan tidak menguntungkan karena terdapat sebuah tatanan-tatanan nilai kehidupan (ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa) yang melanggengkan kemiskinan pada batang tubuh profesi guru. Sadar ataupun tidak, guru dipaksa untuk memiliki karakter yang lemah karsa dengan memiliki polapikir retreatisme dan fatalisme. Semakin pasrah dan menganggap miskin sebagai nasib dan garis hidup seorang guru sebagaimana ungkapan yang disematkan kepada guru, yakni pahlawan tanpa tanda jasa.

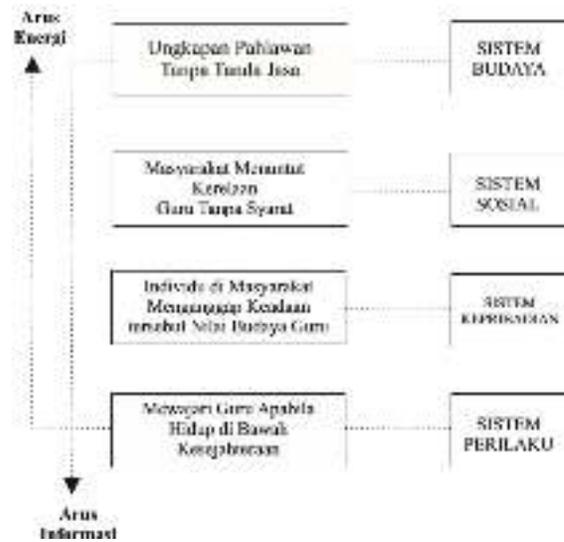
Hasilnya bidang pendidikan di Indonesia sulit berkembang, yang tidak lain diakibatkan karena bangsa Indonesia masih terkungkung oleh pandangan, kondisi,

dan situasi masa lampau yang seolah dipaksakan pada era global dewasa ini. Sebab guru adalah akar dari pembentukan karakter bangsa, maka jika kesalahan ini dibiarkan berlanjut maka tidak mengherankan apabila ada indikasi bahwa gejala lemah karsa bangsa salah satunya tercipta karena kelalaian dalam memperhatikan kesejahteraan guru. Mengacu pada latarbelakang tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa terhadap identitas dan kesejahteraan guru di Indonesia mulai dari penyebab dan dampaknya pada profesi guru dan pendidikan di Indonesia.

**B. KAJIAN LITERATUR**

Parson dalam teori keseimbangan (*equilibrium*) menyatakan bahwa kehidupan merupakan sebuah sistem besar yang terdapat subsistem yang saling mempengaruhi. Jika salah satu berubah, maka yang lain turut berubah, atau untuk mengubah suatu subsistem harus mengubah subsistem lain terlebih dahulu. Melalui proses saling menyesuaikan maka terjadi perubahan yang seimbang, tanpa terjadi guncangan, dan ada dinamika dalam keseimbangan.

Lebih lanjut, dalam teori sibernatik, Parsons mengemukakan bahwa kehidupan masyarakat terdiri atas 4 tahapan sistem, yaitu; budaya, masyarakat, individu, dan prilaku. Parson menyatakan bahwa terjadi arus informasi dari level budaya ke prilaku, dan arus energi dengan arah sebaliknya membentuk ketaatan, jika kedua arus itu dihubungkan terbentuk orientasi kebudayaan, yang divisualisasikan pada gambar berikut.



**Gambar 1**  
Teori Sibernatik (Parson, 1951)

Dalam konteks identitas dan kesejahteraan guru, masyarakat Indonesia yang memiliki pandangan bahwa setiap guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa telah membentuk sebuah orientasi pembudayaan tersendiri. Dampaknya ialah ketika banyak guru di Indonesia yang belum mendapatkan kesejahteraan layak, masyarakat Indonesia tidak terlalu menganggap permasalahan tersebut sebagai permasalahan yang serius, karena secara tidak sadar, ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa dianggap telah menjadi nilai budaya bagi guru di Indonesia, ataupun ketika guru menuntut banyak masyarakat yang menanggapi dengan sentimen. Hal tersebut tidak lain dikarenakan masyarakat menganggap tindakan tersebut bertentangan dengan nilai budaya guru di Indonesia yang semestinya tanpa pamrih atau tanpa tanda jasa.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa untuk meretas permasalahan yang berkaitan dengan identitas dan kesejahteraan guru di Indonesia dan mengembangkan visi guru kedepannya, maka yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah merubah sistem pola pikir masyarakat Indonesia yang kerap mewajarkn apabila kemalangan

membayangi profesi guru. Hal tersebut dikarenakan ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa kerap dijadikan sebuah alasan (*mental blocks*) untuk mencuci tangan apabila guru mendapatkan penghasilan yang kurang layak dan hidup di bawah kesejahteraan. Tentunya hal tersebut berdampak langsung kepada mutu kualitas guru dan mutu pendidikan di Indonesia.

### C. METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode analisis *framing* atau analisis isi mengenai fenomena ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa di Indonesia dari sebuah kajian sosial di dalam masyarakat Indonesia. Objek kajian dalam tulisan ini merupakan pendekatan interpretasi peneliti selama konteks hubungan sebab akibat ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa yang menjadi fokus analisisnya.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat dari ungkapan yang telah bertransformasi menjadi nilai budaya menjadikan masyarakat Indonesia memiliki sebuah perilaku untuk mentaati nilai-nilai budaya guru yang masyarakat pandang sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Parson (1951) bahwa terjadi arus informasi dari level budaya ke perilaku, dan arus energi dengan arah sebaliknya membentuk ketaatan. Sehingga tidak mengherankan apabila ada seseorang yang mengkritisi akan dianggap sebagai individu yang menyimpang atau tidak mentaati nilai-nilai budaya guru di Indonesia, dan tidak jarang individu tersebut dilemahkan dengan kata-kata sindiran berkonotasi negatif.

Berdasarkan hal tersebut, secara sadar maupun tidak sadar, ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa kerap menjadi sebuah pelemahan profesi guru untuk keluar dari permasalahannya, dan menjadi suatu

kesalahan berpikir *argumentum ad populum* masyarakat Indonesia dalam memberikan penilaian identitas terhadap profesi guru. Kesalahan logika dari *argumentum ad populum* yaitu dicirikan sebagai kesalahan yang dilakukan dengan cara mengarahkan suatu daya tarik emosional terhadap pikiran/penilaian orang kebanyakan untuk memenangkan persetujuan orang lain (Walton, 1980). Karena pada esensinya bahasa atau katakata adalah alat berpikir bagi manusia membangun komunikasi, relasi dan konstruksi sosial (Hendriani, 2018).

Akibatnya, ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa secara tidak langsung menjadi sebuah hambatan bagi profesi guru. Hambatan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu hambatan kultural, hambatan sosial, hambatan psikologis, dan hambatan organisasional. Secara ringkas, hambatan-hambatan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Hambatan Kultural

Nilai kepercayaan masyarakat pada profesi guru yang telah tertanam ialah pahlawan tanpa tanda jasa. Nilai kepercayaan yang melekat pada profesi guru menjadikan hal tersebut sebuah keyakinan dan kekuatan kultural di masyarakat bahwa guru bekerja mesti tanpa pamrih. Dampaknya ketika ada beberapa guru yang memprotes hal-hal yang berkaitan dengan penghasilannya, ia akan dianggap menyimpang dan bertentangan dengan nilai kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap profesi guru.

Seringnya guru mendapatkan stereotip pahlawan tanpa tanda jasa mengakibatkan pembudayaan yang tidak baik tumbuh di profesi guru. Guru cenderung takut ataupun malu jika menuntut tentang hal yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Tidak jarang juga mereka merasa pantas dibayar

murah, karena di benak mereka guru adalah profesi yang menuntut pengabdian tanpa syarat. Akhirnya mereka diam saja meski penghasilan jauh di bawah UMR. Padahal, faktanya, mereka menggerutu di belakang, apalagi di media-media sosial. Hasilnya tercermin sebuah perilaku guru yang tidak bisa berbuat banyak selain menyerah dan bergantung pada nasib, sehingga pada akhirnya orientasi nilai budaya profesi guru menghasilkan gejala karakter lemah karsa.

## 2. Hambatan Sosial

Manusia kerap melahirkan sistem sosialnya sendiri, tetapi begitu tercipta, ia kehilangan kontrol terhadap sistem tersebut, bahkan berbalik terkontrol oleh sistem. Akhirnya, orang hanya bisa yakin dengan dirinya sendiri apabila ia mencocokkan diri dengan harapan orang-orang lain (Fromm, 1998). Sama halnya dengan profesi guru, bahkan sejak menempuh pendidikan, para calon guru sudah dijejali oleh sistem sosial yang sudah ada, yakni pahlawan tanpa tanda jasa. Seolah-olah hal tersebut ingin menciptakan bahwa kebenaran tentang hal tersebut adalah mutlak, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, secara tidak sadar hal tersebut menjadi sebuah *mental blocks* dan pelemahan profesi guru untuk keluar dari permasalahannya.

## 3. Hambatan Psikologis

Orientasi pembudayaan pahlawan tanpa tanda jasa mengakibatkan hilangnya rasa simpati dan empati masyarakat terhadap guru. Masyarakat yang terlalu terpaku kepada nilai pahlawan tanpa tanda jasa kerap berkata bahwa seperti itulah pekerjaan guru (tanpa tanda jasa) sehingga menurutnya tidak elok apabila guru menuntut lebih dari pekerjaannya. Akhirnya, sadar maupun tidak, banyak guru yang penghasilannya jauh dari kata layak,

tetapi masyarakat menganggap itu merupakan suatu hal yang wajar.

## 4. Hambatan Organisasional

Adanya dua tingkat lapisan pengajar di Indonesia membuat konflik sosial di dalam bidang pendidikan. Perbedaan nasib diantara keduanya membuat konformitas terhadap norma yang berlaku. Di satu sisi guru PNS menganggap bahwa profesinya tidak masalah dengan ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa karena secara penghasilan sudah dapat dikatakan layak. Di satu sisi guru honorer merasa tidak mendapatkan keadilan karena beban kerja sama tetapi kesejahteraan berbeda, dan ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa kerap dijadikan sebuah senjata untuk melumrahkan keadaan tersebut.

Hambatan yang muncul pada sisi organisasional ialah munculnya potensi budaya penjajah-dijajah pada organisasi guru. Seperti yang diketahui bahwa di Indonesia profesi guru memiliki dua lapisan tenaga pengajar yaitu honorer dan PNS, beban kerja sama dan yang membedakannya hanyalah kesejahteraannya (Surya, 2010). Relevansinya dengan kasus ini adalah apabila status PNS adalah tujuan utama dari guru honorer, maka ketika status guru honorer berubah menjadi PNS dengan jangka waktu yang lama, maka mereka akan mewajari sistem honorer, karena mereka pernah merasakannya dan menjadikan pengalaman eksistensial mereka sebagai sebuah pembenaran. Hal tersebut dikarenakan struktur pemikiran mereka telah dikondisikan oleh pertentangan-pertentangan yang nyata dan dibentuk oleh situasi-situasi eksistensial (Freire, 1998).

Akhirnya tidak jarang para guru bekas honorer yang telah berganti status tidak berbalik memperjuangkan profesi guru, tetapi mereka larut dan terbuai dengan status barunya, bahkan merasa statusnya berada di

atas guru yang berstatus honorer karena adanya pengalaman eksistensial mereka. Pada akhirnya organisasi guru menjadi tidak pernah satu suara, hilang arah, tidak ada sinergi antara junior-senior, ataupun keinginan yang kuat untuk saling memperjuangkan profesi guru untuk ke arah yang lebih baik.

Hambatan-hambatan yang diakibatkan ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa yang telah dijelaskan sebelumnya tentu mempengaruhi kepada kualitas guru dan berpengaruh langsung ke pendidikan. Untuk menguraikannya, teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow sangat representatif untuk digunakan sebagai kerangka teoritis, agar membawa kepada pemahaman yang lebih luas dalam menyelesaikan problem guru yang selama ini dianggap tidak mendapatkan perhatian yang memadai baik secara moril maupun materiil.

Maslow mengidentifikasi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar manusia dalam sebuah hierarki yang terendah dan bersifat biologis sampai tingkat tertinggi dan mengarah pada kemajuan individu. Setiap kali membicarakan motivasi, hierarki kebutuhan Maslow ini didasarkan pada anggapan bahwa pada waktu orang telah memuaskan satu tingkat kebutuhan tertentu, mereka ingin bergeser ke tingkat yang lebih tinggi. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan fisiologis (sandang pangan), kebutuhan rasa aman (bebas bahaya), kebutuhan kasih sayang, kebutuhan dihargai dan dihormati, dan kebutuhan aktualisasi diri.

Hal di atas berkebalikan dengan apa yang terjadi di Indonesia, di Indonesia guru masih bergelut dengan berbagai permasalahan yang begitu kompleks tentang pemenuhan kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Sehingga muncul pertanyaan sarkastik, bagaimana guru dapat mengaktualisasikan dirinya untuk menjadikan mereka guru yang

berkompetensi dan profesional, sedangkan kebutuhan fisiologisnya sering ditutup-tutupi dengan dalih guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa?

Pada akhirnya, alih-alih sebagai pelaku perubahan bangsa, pelaku perubahan untuk diri sendiri saja sudah sulit setengah mati. Alih-alih guru hadir sebagai solusi atas berbagai persoalan bangsa, guru sendiri malah terlarut menjadi bagian dari persoalan bangsa. Maka dari itu, kita tidak dapat mengharapkan perubahan dalam dunia pendidikan terjadi melalui kinerja guru, sebab guru sendiri masih terlarut menjadi bagian dari persoalan bangsa. Stereotip dan persoalan guru inilah yang pertamamata mesti diatasi agar bidang pendidikan dapat berjalan optimal.

Dengan segala idealisme dan ketulusan untuk menjadi pendidik tidak banyak juga guru yang tidak mempersoalkan besaran penghasilan yang diterimanya, namun sebagai manusia biasa mereka juga memiliki kebutuhan yang sama seperti manusia lainnya. Ketika mereka memilih untuk diam atas penghasilan di bawah UMR yang diterimanya, bukan berarti mereka tidak memiliki persoalan apa-apa. Karena kehidupan tidak pernah terlepas dari kehidupan sosial, ketika diberikan penghasilan yang rendah pasti akan terjadi gesekan-gesekan sosial yang merumitkan kehidupan para guru, dan secara tidak langsung mempengaruhi performa guru dalam mengembangkan pendidikan. Pada titik inilah dibutuhkan intervensi dari kalangan akademisi untuk mengatasi persoalan guru agar tidak terjadi pengeksploitasian terhadap profesi guru ataupun sekedar dijadikan komoditas politik oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

## **E. SIMPULAN DAN SARAN**

Adalah sangat menyedihkan apabila dikatakan bidang pendidikan hanya berjalan di

tempat. Jika memang bidang pendidikan berjalan di tempat, maka insan pendidikan tidak boleh membiarkannya, insan pendidikanlah yang 'harus menggerakkan' kembali bidang pendidikan. Keharusan dalam kalimat "harus menggerakkan" merupakan sebuah keharusan yang didasarkan atas hukum moral. Hukum moral berbeda dengan hukum alamiah (Bertens, 2013). Hukum moral tidak dapat berjalan dengan sendirinya seperti halnya hukum alamiah, melainkan hukum moral merupakan semacam imbauan kepada insan pendidikan supaya 'mau' terlebih dahulu, sebelum benar-benar menghidupkan profesi guru ke arah yang lebih baik.

Pendidikan merupakan faktor terpenting yang mencirikan manusia modern. Dalam sebuah teori modernisasi klasik, Alex Inkeles (dalam Chaer, 2013) mengemukakan bahwa satu tahun pendidikan mampu menaikkan dua sampai tiga poin skala modernisasi dari nol sampai seratus. Bagi Inkeles kurikulum informal memiliki pengaruh besar, seperti misalnya kecenderungan tenaga pengajar untuk menyerap nilai-nilai modern kemudian didistribusikan kepada peserta didiknya.

Pendidikan merupakan kawasan luarbiasa karena segala gerak-geriknya berkaitan timbal-balik dengan filosofi, sistem sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Namun anehnya, ketika berbicara tentang guru masih berhitung untung-rugi, bahkan apabila melihat permasalahan banyaknya guru yang dibayar minimum pendidikan tetapi mengharapkan hasil yang maksimum terdengar seperti berharap membeli emas dengan harga tembaga. Bagi insan pendidikan atau orang-orang yang bergerak dalam bidang pendidikan, tentu saja kondisi ini merupakan sebuah masalah besar. Siapapun yang bekerja dalam bidang pendidikan, hendaknya memiliki visi untuk melindungi profesi guru sebagai rangka pembangunan bidang pendidikan yang berkelanjutan. Karena bagaimanapun, proyeksi manusia Indonesia

masa depan bergantung pada kebijaksanaan dan keputusan masa kini (Supriatna, 2016).

Semuanya dapat dimulai dari diri sendiri, dengan membuang pola pikir warisan penjajahan yang mewajarkan profesi guru lumrah apabila hidup di bawah kesejahteraan. Karena yang mesti diperangi ialah budaya warisan penjajahan yang membuat bidang pendidikan hanya berputar-putar di tempat yang sama. Generasi akan terus berputar, dan kita semua adalah calon pemimpin di bidang pendidikan. Apabila pandangan kita masih dibutakan dan terkungkung oleh pemandangan dan realita yang mewajarkan guru cukup hanya diberi tepuk tangan saja, maka tidak akan pernah ada yang berubah meski generasi berganti sekalipun. Perubahan dan pembaharuan tidak akan pernah bergerak dengan sendirinya, melainkan mesti dijemput sesegera mungkin. Roda perubahan tidak akan berputar dengan sendirinya, maka dari itu harus ada seseorang yang memutar dan menggerakannya, karena itu pastikan tangan kita sendiri yang memutar roda perubahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. (2013). *Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bumbungan, Busra. (2016). Peran Guru Dalam Mengintegrasikan Nilai-Nilai Karakter Di Smp Negeri 1 Bua Ponrang Kabupaten Luwu. *Prosiding Seminar Nasional*. Vol 02 (1). 241.
- Chaer, T., M., (2013). Dekonstruksi Pendidikan Karakter Dan Idealisme Pendidik. *Jurnal Edukasi Islami*. Vol 2 (03). 310-324.
- Freire, P. (1998). *Menggugat Pendidikan: Pendidikan yang Memanusiakan, Pendidikan yang Membebaskan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hendriani, A. (2018). Pedagogik Literasi Kritis; Sejarah, Filsafat dan Perkembangannya di Dunia Pendidikan. *Pedagogia: Jurnal Ilmu Pendidikan*. 16(1), 42-55.
- Koesoema, D. (2009). *Pendidikan Karakter di Zaman Keblinger*. Jakarta: Grasindo.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. Glencoe: The Free Press.
- Soeharto, K. (2010). Perdebatan Ideologi Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan No. 2*, 134-146.
- Supriatna, M. (2016). Problem Ontologi Semarang. *Journal of Physical Education and Sports*, Vol 6(1), 57-65. Pendidikan Indonesia. *Pedagogia: Jurnal Ilmu Pendidikan*. (14)3, 485-489.
- Surya, M. (2010). *Landasan Pendidikan: Menjadi Guru yang Baik*. Bandung: PT. Ghalia Indonesia.
- Syawaludin, Mohammad. (2014). Alasan Talcott Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*. Vol. 7 (1). 150-166.
- Tilaar, H.A.R. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Kultural*. Jakarta: IndonesiaTera.
- Wahyu, T.R. (2009). Kemiskinan dan Bagaimana Memerangnya. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(7), 56-65.
- Yuasidha, N., R,. (2014). Kohesivitas Penduduk Asli Dan Pendatang Dalam Multikulturalisme Kohesivitas Penduduk Asli Dan P e n d a t a n g D a l a m Multikulturalisme. *Jurnal Online Sosiaologi Fisip Unair: Komunitas*. Vol. (3) 1.